PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BINJAI HILIR

Jemain, Petrus Atong, Abang Zainudin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jln. Oevang Oeray Nomor 92 Baning Kota Sintang
Email:atong-petrus@gmail.com.
Email **:**ab_jay57@yahoo.co.id

Abstrask: Pelaksanaan pembangunan di desa, antara lain menjadi salah satu fungsi dan tanggjungawab kepala desa. Peranan penting pelaksanaan pembangunan di desa adalah Kepala Desa harus mampu meningkatkan kegiatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dan badan perwakilan desa untuk bersatu padu melaksanakan pembangunan di desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang telah dilakukan berupa peningkatan koordinasi, sosialisasi pemeliharaan hasil pembangunan serta peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Pelaksanaan, pembangunan, desa.

Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor pembangunan daerah sampai pada tingkat pedesaan menjadi perhatian khusus pemerintah karena desa merupakan mata rantai dalam sistem kepemerintahan organisasi berada di bawah pemerintah kecamatan.Selain itu, desa menjadi obyek dari pelaksanaan pembangunan karena desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional.Hal ini sebagaimana pendapat Marbun (2000:34) yang menyatakan bahwa "faktor desa perlu digarap dan dikembangkan secara maksimal karena tidak berlebihan kalau disebut pembangunan di Indonesia tidak ada artinya tanpa pembangunan desa. Ketahanan nasional juga berada di desa, hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari keberhasilan pembangunan desa".

Berdasarkan pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari pembangunan nasional maupun pembangunan daerah yang terpadu dan terarah baik secara fisik maupun non fisik, sehingga keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan di desa akan menjadi barometer terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa kegagalan pembangunan di tingkat pedesaan juga merupakan kegagalan pembangunan di tingkat nasional, karena belum terjadinya pendistribusian pembangunan secara merata di daerah Indonesia.

Pembangunan desa yang berkelanjutan mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Sasaran pokok pembangunan Nasional suatu usaha mewujudkan tujuan pembangunan desa.Pemerataan pembangunan nasional khususnya pembangunan masyarakat desa, perlu dilanjutkan dalam peningkatan kesempatan perluasan kerja, pembinaan dan pengembangan, lingkungan pemukiman pedesaan yang sehat serta peningkatan kemampuan penduduk untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pedesaan dan perhatian yang lebih besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan di pedesaan dan perhatian yang melalui peningkatan prasarana dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam yang ada.

Pelaksanaan pembangunan desa sangat bersinergi dengan perencanaan desa dimana perencanaan memiliki peran penting untuk menjamin suksesnya pembangunan desa tersebut. Hal ini karena dalam pengembangan kegiatan pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukkan setiap pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan di desa Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa perencanaan pembangunan nasional perlu dilaksanakan dan diarahkan secara sistematis, terarah, dan konfrehensif agar tahapan perencanaan mengakomodir setiap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Fungsi kepala desa tidak dapat dipungkiri, karena hal ini juga sangat berkaitan dengan fungsi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa disebutkan bahwa "Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia".

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-

tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.Fungsi Kepala Desa selakupimpinan pemerintahan harus dilaksanakan secara optimal baik serta aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan tindak lanjuti oleh seorang Kepala Desa agar apa yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan desa harus lebih diprioritaskan serta perlu mendapat dukungan dari semua pihak baik dari perangkat desa, BPD maupun organisasi masyarakat setempat agar pelaksanaan pembangunan desa lebih maksimal. Pelaksanaan pembangunan merupakan proses keberlangsungan kehidupan masyarakat desa. Sebagai proses perubahan sosial secara berencana dengan meliputi berbagai dimensi kemajuan dalam rangka kesejahteraan ekonomi, modernisasi, kemajuan bangsa, wawasan lingkungan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidup. Untuk memberikan arah dalam proses penelitian terutama pada proses pengumpulan data dan pembahasan hasil, maka peneliti memberikan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. 2. Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Koordinasi sebagai salah satu yang dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan maupun kesalahan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas, sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan.Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Salah satu tujuan koordinasi adalah untuk menyatukan persepsi terhadap suatu rencana sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan secara terpadu, terarah, dan efektif sehingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini maksudkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa agar tidak terjadi kekacauan dalam menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat atas.Sebagaimana dijelaskan oleh Handoko (2003:195) yang mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Koordinasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam rangka memadukan dan menyatukan antar berbagai tujuan dalam lingkungan organisasi. Koordinasi dilaksanakan sebagai bagian dari manajemen yang kaitannya dengan fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengorganisasian. Oleh karena itu, pelaksanaan akan dapat terlaksana dengan baik bila semua fungsi manajemen juga berjalan baik. Hal ini dikatakan Harold Koontz dan Donnel (1991:3) mendefinisikan pelaksanaan adalah hubungan antara aspek-aspek individu yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien untuk bertujuan yang nyata.

Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa lebih terbuka sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, guna mencapai pencapaian tujuan organisasi atau lembaga maka setiao unit kerja harus terkoordinasi dengan baik agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai tangggung jawab yang diembannya.

Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa, tentunya tidak terlepas dari fungsi dari seorang kepala desa yang memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan pihak atau lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka berkomunikasi terkait pelaksanaan pembangunan desa.Hal ini dikatakan oleh Handayaningrat (2005:88) ,"Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi".

Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepasdari dukungan sumber daya manusia yang merupakan kekuatan utama sebagaimana

dijelaskan oleh Haris (2000:4) sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pada prinsipnya yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu prasyarat dan tujuan pembangunan, maka tugas-tugas pemerintah adalah antara lain pembinaan keterampilan serta sikap yang lebih maju.Konsep pembinaan masyarakat dalam perspektif pembangunan yang berkelanjutan terutama pada masyarakat desa diharapkan dapat memberikan dampak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembinaan masyarakat melibatkan banyak pihak yaitu, dari pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, lembaga-lembaga non pemerintah maupun masyarakat desa sendiri, proses pembinaan yang berlangsung harus dilakukan secara terus menerus dan simultan sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang diharapkan.Salah satunya adalah perubahan perilaku denagn adanya kesadaran yang timbul dari masyarakat sehingga ikut partisipasi aktif dalam pembangunan desa (Sutrisno, 1995:24).

Pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya unutk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta unutk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara efektif. Pembinaan sebagai proses perubahan perilaku sertapembinaan masyarakat yang mengarah kepada pengetahuan, sikap dan ketrampilan di kalangan masyarakat agar mereka mampu melaksanakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan partisipasi pembangunan desa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Thoha (1997:16-17) sebagai berikut : Pembinaan adalah suatu tindakan proses atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan *(change).* Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan masyarakat. Pembinaan menunjukkan kepada perbaikan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehingga ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pembangunan ada dalam beberapa bentuk.

Sebagaimana Slamet (20033:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu: Partisipasi didalam tahap perencanaan Partisipasi di dalam tahap perencanaan *(idea planing stage).* Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakanPartisipasi dalam tahap pelaksanaan Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. Partisipasi didalam tahap pemanfaatan Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Peran serta masyarakat kedepannya bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah, ataupun lembaga-lembaga non pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab dari kesadaran masyarakat itu sendiri.Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel atau permasalahan-permasalahan yang diteliti. Subjek penelitian adalah Kepala Desa Binjai Hilir dan Ketua BPD Desa Binjai Hilir.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.Hal ini karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk memperoleh data. Dengan demikian, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan yaitu :1.Wawancara. 2. Observasi. 3. Dokumentasi. Analisis data dilakukan agar data yang telah diperoleh akan lebih bermakna. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Menurut Bogdan dan Biklen (1992:145) mengemukakan analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan dan mengatur catatan wawancara, catatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik pengumpulan data lainnya. Kegunaan analisis data untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami, untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju dan sejahtera.Pelaksanaan pembangunan desa perlu adanya koordinasi pemerintahan desa dengan berbagai pihak yang terkait dalam program kerja pembangunan desa. Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa sebagai integrasi antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana koordinasi yang dilakukan tentunya akan menjadi efektif apabila dilakukan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan *(leadership)* kepala desa. Oleh karena itu, kepala desa harus memiliki manajemen kepemimpinan yang profesional sehingga mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga akan terwujudnya program-program pembangunan desa yang tepat sasaran.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbedaagar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selesai pada waktunya, sehingga hasil yang diharapkan juga menjadi maksimal. Koordinasi merupakan setiap usaha yang dilakukan harus dengan seluruh daya dan kemampuan yang ada sehingga koordinasi akan menjadi efektif. Kepala desa tentunya harus memiliki manajemen yang baik dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan desa.

BPD dan Pemerintahan desa tetap berkoordinasi maupun kerjasama dalam upaya membangun hubungan yang baik untuk kepentingan masyarakat desa.Artinya bahwa, BPD tetap berusaha secara optimal dalam membantu Pemerintah Desa Binjai Hilir untuk melaksanakan program-program desa serta BPD dalam hal ini tetap melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam rangka pembangunan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan desa yang mandiri dan maju membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari semua pihak yang terkait dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat desa.Tentunya kerjasama sangat diharapkan dengan berbabagi pihak apakah dari BPD desa maupun dari masyarakat.Hal ini sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan desa dengan mengacu kepada prinsip partisipatif pembangunan desa.Oleh karena itu, pelaksanaan program-program pembangunan desa harus lebih diprioritaskan dan tepat sasarannya.

Pelaksanaan program pembangunan desa merupakan cerminan dari kegiatan yang dilakukan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tahun 2015 ini pembangunan jalan desa dan dusun, renovasi kantor desa, renovasi gedung sekolah TK, dan renovasi gedung puskesmas.Semuanya diharapkan bisa dilaksanakan guna memberikan akses terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik adalah bagaimana memberikan pelayanan yang efektif sehingga akan menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dibutuhkan.

Pelaksanan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik sangat dipengaruhi oleh terlaksananya koordinasi dengan baik maupun kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Tuntutan profesionalitas aparatur pemerintahan desa saat ini tentunya harus disiapkan dengan baik serta memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, komitmen terhadap kualitas kerja, dan dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah desa.Oleh karena itu, koordinasi sangat penting dilakukan antara Kepala Desa dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan pembangunan desa.

Jumlah aparatur pemerintahan desa Binjai Hilir dari aspek tingkat pendidikan rata-rata tamatan SMU, diantaranya enam orang tamatan SMA atau sederajat dan satu orang tamatan SMP. Akan tetapi pemberdayaan terhadap aparatur terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan melalui kerjasama dengan pihak kecamatan maupun kabupaten dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan yang diharapkan sehingga akan menghasilkan kualitas aparatur desa yang mampu bekerja dengan baik.

Perencanaan pembangunan desa diperlukan dalam rangka bagaimana mengelola setiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa yang diharapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.Hal ini tentunya membutuhkan sumber daya aparatur desa yang mampu merencanakan dengan baik. Sumber daya aparatur perangkat desa maupun BPD secara kualitas pendidikan masih kurang, namun BPD dan pemerintah desa berupaya untuk tetap bekerja sebaik mungkin terutama dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Perencanaan program pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui BPD yang disampaikan kepada pemerintahan desa yang diharapkan untuk menggali potensi-potensi masyarakat desa. Hal ini sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan yang didasari atas prinsip partisipatif sehingga hasil-hasil pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pembangunan yang dilakukan tentunya tidak semulus yang diharapkan karena membutuhkan dukungan masyarakat maupun koordinasi sebagai modal dalam keberlangsungan suatu pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang secara bersama-sama melaksanakan pembangunan desa serta koordinasi yang intens dari berbagai pihak dalam pembangunan desa.Kedua hal ini sangat penting dalam kemajuan pembangunan desa serta sebagai penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Memajukan pembangunan desa tidak semudah dipikirkan karena ada faktor yang menjadi kendala dalam pembangunan itu sendiri, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan Desa Binjai Hilir misalnya partisipasi masyarakat yang masih kurang maupun koordinasi yang belum maksimal pada tingkatan pemerintahan desa dengan BPD serta pihak-pihak desa yang lainnya (tokoh masyarakat/adat) sehingga hal ini menjadi penghambat dalam program pembangunan desa kedepan.

Pembangunan desa diarahkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang secara keseluruhannya akan menggerakan perekonomian desa sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga akan bertambah. Oleh karena itu, koordinasi ataupun musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai rangkaian kegiatan yang menghubungkan, memadukan serta bertujuan untuk menserasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan bersama agar menghindari masalah-masalah yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan program desa.

Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Pembinaan partisipasi masyarakat merupakan proses yang dilakukan untuk memperkuat serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut pro aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Pembinaan partisipasi sangat diperlukan sebagai tujuan utama dalam membina perilaku sosial masyarakat desa bahwa partisipasi memiliki arti penting guna membangun pembangunan desa dengan berlandaskan pada nilai-nilai partisipatif maupun nilai kebersamaan.

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan suatu kegiatan dimulai dari tingkat paling awal yaitu perencanaan hingga kegiatan tersebut selesai dan pemanfaatannya dirasakan bersama-sama oleh masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD desa Binjai Hilir dikatakan bahwa partisipasi sendiri tidak terbatas pada kegiatan fisik atau pemberian dana namun juga menjaga mengelola dan mempertahankan apa yang sudah masyarakat capai dari suatu kegiatan yang diselenggarakan. Pembangunan bukan berarti peningkatan pendapatan masyarakat saja namun pembangunan merupakan suatu proses reorganisasi dan pembaharuan seluruh sistem serta aktivitas dalam hal ekonomi dan sosial dengan tujuan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pembinaan partisipasi masyarakat dilakukan dalam membangun kesadaran masyarakat dan sekaligus sebagai penunjang utama pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program kerja pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan atas kehendak masyarakat.

Pembinaan partisipasi yang baik akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dengan didasarkan atas komitmen masyarakat dan sebagai modal dalam percepatan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD dikatakan bahwa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat diperlukan adanya keserasian dalam kegiatan agar dapat mengundang minat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kerja pembangunan yang dilaksanakan, sehingga mereka dapat merasakanbahwa pembangunan itu memang perlu bagi masyarakat. Pembinaan partisipasi masyarakat berkaitan dengan beberapa aspek yang dilaksanakan seperti sosial budaya, pendidikan, ekonomi maupun kesehatan.Hal ini dimaksudkan agar ada kesadaran dari masyarakat bahwa partisipasi memiliki tujuan untuk bersama-sama membangun pembangunan desa yang lebih baik.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara mengumpulkan masyarakat untuk memberikan pengertian tentang apa-apa yang perlu dilaksanakan suatu kegiatan dan bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah desa tinggal mengarahkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan suatu program baik program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi.

Pembinaan partisipasi dilakukan bukan hanya pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik saja, namun pemerintah desa juga perhatian kepada organisasi-organisasi sosial di desa seperti, PKK, lembaga adat, lembaga agama, dan karangtaruna.Hal ini dilakukan agar ada kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya organisasi sosial desa yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Sementara dalam bidang sosial budaya pemerintahan desa lebih mengarahkan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan harus seiring dan secara bersama-sama bergotong royong sehingga benar-benar pembangunan desa yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan pembangunan desa secara esensial harus memiliki visidan kemandirian dengan pola pengelolaan yang lebih optimal efektif dan efisien, serta demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.Oleh karena itu, pemerintahan desa dalam hal ini harus lebih aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa semuanya tidak akan berjalan dengan baik.

Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik informasi tentang aspirasi, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Binjai Hilir diketahui bahwa partisipasi bisa membangun rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa, sebab partisipasi merupakan kunci pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan.

Kesadaran partisipasi masih kurang, namun pemerintahan desa tetap melakukan berbagai strategi dan pendekatan-pendekatan pembinaan dengan sosialisasi dan penyuluhan terkait program-program pembangunan desa kepada masyarakat. Dengan adanya strategi dan pendekatan seperti sosialisasiserta penyuluhan ini maka akan meningkatkan kebersamaan dalam membangun desa yang lebih baik. Oleh karena itu, pembinaan partisipasi dilakukan untuk mencegah timbulnya sikap-sikap apatis yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik dan bagaimana keikutsertaan serta keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.Dengan demikian pembinaan partisipasi dapat dikatakan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif sehingga rasa kesadaran akan muncul dari masyarakat itu sendiri dan rasa memiliki yang kuat kepada pembangunan desa yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan sudah berjalan namun belum maksimalnya koordinasi antar Pemerintah Desa dan BPD. Pembinaan partisipasi masyarakat sudah dilakukan, hanya saja belum berjalan dengan maksimal. Namun pembinaan terus dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih aktif lagi dalam pembangunan desa. Disarankan fungsi kepala desa perlu ditingkatkan lagi dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun koordinasi yang lebih maksimal dengan BPD maupun dengan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai waktu yang ditentukan dan kepentingan masyarakat. Pembinaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah berjalan namun perlu adanya kerjasama yang intens antara pemerintah desa, dilakukan seperti sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka penyadaran masyarakat tentang pentingnya penbangunan desa yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Harold Koontz.,Cyril O'Donnel, 1991. *Principles of Management.*Kogakusha Co. Ltd. Tokyo.

Handayaningrat, Soewarno, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen.*Jakarta: Gunung Agung.

Handoko, T. Hani, 2003. *Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan 18.* Yogyakarta: BPFE

Moleong Lexy, J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif.*Bandung : Rosdakarya.

Marbun, 2000.*Proses Pembangunan Desa, Menyongsong Tahun 2000.*Surabaya: Erlangga

Sutrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif.* Yogyakarta: UGM Press.

Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.